

- Arif Sultan. 1994. "AN ANALYSIS OF BUDGET DEFICIT WITH SPECIAL REFERENCE TO PAKISTAN." *Pakistan Economic and Social Review* 32 (2): 159–75.
- David N.Hyman. 2005. *Public Finance A Contemporary Application of Theory to Policy*. Ohio: South Western.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. 2016. "Selayang Pandang Kota Surakarta." 2016. <http://dprd.surakarta.go.id/selayang-pandang/>.
- Efdiono. 2011. "Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Studi Kasus Tahun 1990 - 2011." *Journal of Controlled Release* 156: 1–16.
- Eisner, Robert. 1989. "Budget Deficits: Rhetoric and Reality." *Journal of Economic Perspectives* 3 (2): 73–93. <https://doi.org/10.1257/jep.3.2.73>.
- F. Gerard Adams. 1988. "American Academy of Political and Social Science Eliminating the Federal Budget Deficit without Recession Author ( s ): F . Gerard Adams Source : The Annals of the American Academy of Political and Social Science , Vol . 500 , Whither the American Empire." *American Academy of Political and Social Science, Sage Publications, JSTOR* 500: 8–22.
- Halim, Abdul. 2014. *Teori Konsep Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik : Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. 2nd ed. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Hodler, Roland. 2011. "Elections and the Strategic Use of Budget Deficits." *Public Choice* 148 (1–2): 149–61. <https://doi.org/10.1007/s11127-010-9650-5>.
- Jayanti, Sri Delasmi. 2011. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pemerintah Daerah Melakukan Defisit Pada Penganggaran Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta)." Universitas Gadjah Mada.
- Kusdinar, Aanisah. 2016. "ANALISIS PENYEBAB DAN DAMPAK DEFISIT

- Larkey, Patrick D., and Richard A. Smith. 1989. “Bias in the Formulation of Local Government Budget Problems.” *Policy Sciences* 22 (2): 123–66.
- <https://doi.org/10.1007/BF00141382>.
- Leo Lex. 1998. “STATES’ USE OF SURPLUS FUNDS November 1998.” Washington.
- Mankiw, N. Gregory, Euston Quah, and Peterr Wilson. 2008. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Asia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Analisis Standar Belanja : Konsep, Metode Pengembangan, Dan Implementasi Di Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Sekaran, Uma, and Roger Bougie. 2013. “Research Method for Business.” *John Wiley & Sons, Inc.* <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Sholeh, Chabib, and Heru Rochmansjah. 2009. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugijanto, Robert Gunadi, and Sonny Loho. 1995. *Akuntansi Pemerintahan Dan Organisasi Non-Laba*. Malang: Brawijaya Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Swasono, Dwinanda Ardhi, and Berly Martawardaya. 2015. “Pengaruh Defisit Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pendahuluan Tinjauan Referensi.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 15 (2): 144–57.
- Yin, Robert K. 2009. *Case Study Research*. United States of America: SAGE.
- Yin, Robert K., and Robert K. Yin. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. The Guilford Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Bidang Anggaran. 2018. *Nota Keuangan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2008-2017*.

Surakarta: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.

Bidang Akuntansi. 2018. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016-2021*. Surakarta: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.

Bidang Akuntansi. 2018. *Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2008-2017*. Surakarta: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.

DJPk Kemenkeu. 2017. *Dokumen Deskripsi Dan Analisis APBD Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.07/2017 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah*.

Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah*.